

PENEGAKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MUCIKARI MELALUI MEDIA *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Gema Dwi Arnepri, 18150009, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Humaniora, Program Studi
Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas

ABSTRAK

Kehidupan era globalisasi saat ini semakin berkembang sehingga kehidupan manusia dipermudah dengan kemajuan pesat di era globalisasi saat ini terutama di media, saat ini media bukan sosial bukan hanya televisi saja melainkan telah banyak media yang semakin hari semakin berkembang, terutama di media sosial. Semakin berkembangnya media sosial maka semakin berkembang juga kejahatan tindak pidana yang terjadi saat ini, salah satunya kejahatan tindak pidana prostitusi *online* yang biasanya prostitusi itu dilakukan secara *online*, tetapi saat ini prostitusi sudah bisa dilakukan secara *online*, seperti yang sering terdengar sekarang adalah mucikari melakukan transaksi melalui media *online*, selain memudahkan si pelaku mucikari tetapi media juga mempermudah si pengguna jasa mucikari tadi. Adapun media yang biasanya mucikari melakukan transaksi melalui media *online* yaitu seperti *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, *Instagram*, *whatsapp*, dan bahkan bisa saja melalui *web*, Kota Padang salah satu kota yang juga ditemukan kasus prostitusi mucikari melalui media *online*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penegakan Hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap Tindak Pidana mucikari melalui media *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang. 2). Bagaimana bentuk hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam melakukan Hukum Pidana terhadap pelaku mucikari melalui media *online* di Wilayah Kepolisian Resor Kota Padang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, data dikumpulkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Padang, sifat penelitian deskriptif, dan sumber data dari penelitian ini adalah bahan Hukum primer, Sekunder, dan Tersier. Hasil penelitian adalah pihak Kepolisian menjabarkan apa saja hukuman, bagaimana bentuk hukuman dan apa saja yang menjadi halangan bagi pihak Kepolisian dalam menegakan Hukum Pidana bagi pelaku Tindak Pidana mucikari melalui media *online*.

Kata kunci: Bentuk penetapan Hukum pidana, Mucikari prostitusi, Media *online*.

**CRIMINAL ENFORCEMENT AGAINST PERFORMERS OF THE CRIMINAL ACT OF
MUCIKARI THROUGH ONLINE IN THE JURISDICTION OF PADANG CITY RESORT
POLICE**

Gema Dwi Arnepri, 18150009, Faculty of law, Social science and humanities, Legas study
program, Dharma Andalas University

ABSTRACT

Life in the current era of globalization is increasingly developing so that human life is made easier by rapid progress in the current era of globalization, especially in the media, currently non-social media is not just television but there are many media that are increasingly developing day by day, especially in social media. As social media develops, the criminal crimes that occur today also increase, one of which is the crime of online prostitution, where prostitution is usually carried out online, but now prostitution can be carried out online, as is often heard now is that pimps carry out transactions through online media, apart from making it easier for the perpetrators of pimping, the media also makes it easier for the users of pimping services. The media that pimps usually carry out transactions through online media are WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Chat, and even via the web, Padang City is one of the cities where pimp prostitution cases have also been discovered through online media. The problem formulation in this research is 1). How is the enforcement of criminal law carried out by the Padang City Resort Police regarding criminal acts of pimping through online media in the jurisdiction of the Padang City Resort Police. 2). What are the obstacles experienced by the Padang City Police in carrying out criminal law against pimps via online media in the Padang City Resort Police Area? This research uses empirical juridical research, data is collected from interviews with the Padang City Police, the nature of the research is descriptive, and the data sources from this research are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research are that the Police explain what punishments are, what forms of financial punishment are obstacles for the Police in enforcing the Criminal Law for perpetrators of the crime of pimping through online media.

Keywords: *Form of criminal law determination, prostitution pimping, online media.*